

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Agus Dwiyanto, 2003, *Reformasi Pelayanan Publik*, Policy Brief, UGM, Yogyakarta.
- Ali Mufiz, 27 Desember 2008, *Lembaga Pelayanan Terpadu Sebagai Langkah Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Makalah Workshop Pelayanan Terpadu.
- Arif Nasution, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- A.W. Widjaja, 1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy Supriady, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta.
- H. Syaukani, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- KIP RI, 2009, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Kuncoroningrat, 1981, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Muchan, 2000, *Otonomi Daerah dan Ketidakadilan Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 1992, *Statistik Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.

Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

WJS Poerwodarminto, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa Dan Kelurahan.

